

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 0098-Int-KLPPM/UNTAR/III/2023**

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Maret tahun 2023 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP
NIDN/NIDK : 0308126802
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Gilbertus Brian [125220191]
 - b. Nama dan NIM : Lydia [125220186]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2023 Nomor: 0098-Int-KLPPM/UNTAR/III/2023 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian **"Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP Untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika."**
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir, laporan keuangan dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi.,
Ph.D., P.E., M.ASCE

Pihak Kedua



Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 9.000.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 9.000.000,-
	Jumlah	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 9.000.000,-

Jakarta, 30 Maret 2023
Pelaksana PKM



Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENYULUHAN PENGGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP UNTUK SISWA-SISWI SMA
BHINNEKA TUNGGAL IKA JAKARTA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP (0308126802/10192053)

Anggota

Gilbertus Brian (125220191)

Lydia (125220186)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM

Periode 1 /Tahun 2023

1. Judul PKM : Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP Untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika Jakarta
2. Nama Mitra PKM : SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP
 - B. NIDN/NIK : 0308126802 / 10192053
 - C. Jabatan/Gol. : Lektor
 - D. Program Studi : S1 Akuntansi
 - E. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - F. Bidang Keahlian : Akuntansi dan Pajak
 - H. Nomor HP/Tlp : 0816770369 / 5655514
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 2 orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Gilbertus Brian (125220191)
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Lydia (125220186)
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Sekolah Bhinneka Tunggal Ika
 - A. Wilayah Mitra : Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora
 - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
 - C. Provinsi : DKI Jakarta 11270
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel SERINA dan PINTAR
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 9.000.000

Jakarta, 10 Juli, 2023

Pelaksana

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.
NIK:10381047

Tony Sudirgo, SE, MM, Ak, CA, BKP
0308126802/10192053

DAFTAR ISI

	Hal.
RINGKASAN.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1 Analisis Situasi.....	5
1.2 Permasalahan Mitra.....	8
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	9
BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	10
2.1 Solusi Permasalahan.....	10
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	11
BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	12
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	12
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	12
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	13
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	14
4.1 Kronologi kegiatan PKM.....	14
4.2 Hasil kegiatan PKM.....	15
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
5.1 Kesimpulan.....	20
5.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN 1	22
LAMPIRAN 2.....	24
LAMPIRAN 3.....	25
ARTIKEL SENAPENMAS.....	25
ARTIKEL PINTAR.....	37

RINGKASAN

Para siswa-siswi sekolah menengah atas merupakan bagian masyarakat yang beranjak dewasa. Sebagian dari mereka akan memperoleh penghasilan dan memiliki potensi untuk menjadi wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam kerangka pengembangan pembangunan negara, pemerintah membutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak yang akan digunakan untuk kebutuhan dan pembangunan negara. Dalam regulasi yang baru diterbitkan menjelang akhir tahun 2022 lalu ada ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi yang akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2024 nanti. Agar para siswa-siswi SMA ini lebih mengerti tentang peraturan baru dan mengingat usia para peserta didik siswa-siswi SMA ini, maka diadakanlah penyuluhan terkait materi ini. Kami akan membekali mereka dengan pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan yang ada, dampak dan pengaruh akibat perubahan peraturan ini. SMA Bhinneka Tunggal Ika selaku mitra PKM ini membutuhkan perluasan wawasan bagi siswa-siswinya terkait dengan perkembangan peraturan perpajakan sebagai landasan para siswa-siswi tersebut apabila telah lulus dan menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Dengan dilaksanakannya PKM ini, diharapkan dapat memberi pemahaman yang benar terkait pengenaan NIK sebagai NPWP dan membekali para siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika agar dapat menggunakan ilmu ini di masa yang akan datang maupun sekarang.

Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan secara tatap muka dengan mendatangi lokasi sekolah yang berada di daerah Jembatan Lima. Dalam penyuluhan ini akan dibagikan modul Penyuluhan Pengenaan NIK Sebagai NPWP sebagai luaran PKM yang dapat dibaca kembali oleh siswa-siswi SMA tersebut. Hasil luaran dari kegiatan ini juga akan disajikan dalam kegiatan SERINA dan dimasukkan dalam artikel PINTAR. Metode pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan dengan penjelasan dan diskusi yang seluruhnya akan dilaksanakan secara langsung. Kegiatan PKM ini direncanakan akan dilaksanakan dengan mengisi jadwal belajar mata pelajaran Ekonomi dan dapat diikuti oleh guru yang mengampu mata pelajaran tersebut juga.

Kata kunci: PKM, NIK, NPWP, SMA Bhinneka Tunggal Ika.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika pada awal pendiriannya bernama Ta Tung. Berdirinya sekolah ini disebabkan atas rasa keprihatinan Alm. Bpk Djoko Haryono terhadap dunia pendidikan pada masa tahun 1968 karena banyaknya anak Indonesia yang putus sekolah maupun tidak bersekolah. Pada tahun 1971 nama Ta Tung diubah menjadi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika atas inisiatif dari Wakil Presiden Indonesia Pertama yaitu Alm. Mohammad Hatta. Hingga saat ini Yayasan Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika yang menaungi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika yang berazaskan Pancasila tanpa memandang suku, ras, dan agama terus berpartisipasi dalam pengembangan Pendidikan dan Pengajaran serta pelayanan sosial lainnya, maupun mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dalam segala bidang. Yayasan menyelenggarakan Pembelajaran Umum (SMA) maupun Kejuruan (SMK) sebagai bentuk upaya mencerdaskan generasi muda dan membentuk pribadi yang utuh serta menghargai perbedaan. Berikut ini adalah foto Sekolah Bhinneka Tunggal Ika yang akan menjadi mitra pelaksanaan PKM :

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika memiliki Visi dan Misi yang diungkapkan sebagai berikut:

Visi : Menjadi Lembaga Pendidikan Nasional terkemuka dan modern yang turut serta membangun generasi Penerus Bangsa dalam Ilmu, Iman dan Karakter tanpa memandang Suku, Ras dan Agama berasaskan Pancasila.

Misi : Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Pendidikan Karakter, Pengajaran Bermutu, Toleran dan Menghargai Semua Perbedaan yang ada, melalui peserta didik yang dipercayakan Orang Tua dan Wali Murid kepada Kami sebagai Lembaga Pendidik Terpercaya

Dalam melaksanakan visi dan misi di atas, sekolah Bhinneka tunggal Ika melakukan :

- Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter yang dilakukan meliputi pemberdayaan potensi dan budaya peserta didik guna membangun karakter pribadi yang unik dan baik sebagai warga negara Indonesia.

- Pengajaran Bermutu

Pengajaran bermutu dilaksanakan dengan cara melibatkan peserta didik secara penuh dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa diharapkan berhasil mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.

- Rasa toleransi

Rasa toleransi diterapkan dengan menanamkan pembelajaran hubungan antar sesama manusia yang berbeda ras, suku, agama agar nantinya para lulusan sekolah dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang lain dengan baik.

- Menghargai perbedaan

Melalui pendidikan multikultural dan pemahaman akan perbedaan, pihak sekolah menumbuhkan rasa kesadaran tentang pentingnya sikap menghargai, mengakui, dan menerima keberagaman yang ada sehingga diharapkan dapat terciptanya rasa saling menghargai mengenai perbedaan yang ada.

Para siswa-siswi SMA merupakan bagian dari masyarakat yang beranjak dewasa yang akan memperoleh penghasilan pada waktunya nanti sehingga akan memiliki potensi untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagai pegawai atau wirausaha serta akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identitas pembayar pajak. Terkait dengan statusnya nanti sebagai Wajib Pajak, para lulusan ini tentu saja perlu mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak, para siswa-siswi sekolah menengah atas ini perlu juga mengetahui ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai bekal mereka setelah lulus dan menjadi bagian masyarakat seutuhnya. Ditambah dengan memberikan kesadaran dari awal akan pentingnya pajak bagi negara diharapkan maka setiap warganegara Indonesia kan menjadi lebih patuh dan sadar dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimanapun, kita memang tidak boleh meninggalkan sejarah. Berbagai hal yang berkaitan dengan pajak yang kita kenal sekarang

seperti Pajak Penghasilan, Bea Cukai, Tax Treaty, Pajak Penjualan, Bea Materai, Restitusi, dan bahkan Tax Audit adalah warisan dari sejarah masa lalu. Dengan perjalanan panjang yang penuh luka dan peperangan, pajak telah mengantarkan kita ke saat ini di mana pajak bisa menjadi alat yang efektif dan efisien untuk membiayai pengeluaran bersama untuk kepentingan bersama pula. Karena itu biarkanlah luka dan peperangan tetap menjadi masa lalu. Di masa sekarang: “Orang Bijak Taat Pajak dan Aparat Pajak Harus Bijak “ (Mustaqiem,2014, hal 60).

Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 ayat (1a) adalah pengenaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Pasal 2 ayat (2) dan dijelaskan lebih lengkap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 . Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah :

1. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi;
2. Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP;
3. Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Menurut Djeni dan Estralita (2021) bahwa setiap orang pribadi yang berpenghasilan merupakan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak harus mengerti akan kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dimilikinya.

Sementara menurut Yuniarwati dan Nugroho (2022) bahwa tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada

anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak nya diperlukan NPWP sebagai identitas dari si pembayar pajak. Saat ini dan mendatang maka identitas NPWP ini akan segera digantikan oleh NIK yang ada di KTP untuk memudahkan negara dan si wajib pajak dalam mencantumkan nomor identitas dalam pembayaran pajak nya.

Menurut Nataherwin dan Mareni (2021), banyak orang yang kalau mendengar kata-kata membayar pajak bisa membuat pusing atau sengaja menghindarinya. Hal tersebut terjadi karena pajak bagi sebagian orang berkesan rumit dan juga membingungkan, serta sering merasa keberatan untuk mengurangi pendapatan mereka demi membayar pajak. Orang sering kali tidak berpikir bahwa selama ini kenikmatan menggunakan jalan raya, jembatan, penerangan jalan, taman dan fasilitas lainnya bukan berasal dari pajak yang dibayarkan mereka.

Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak menjadi perhatian kami sebagai pendidik agar para siswa-siswi SMA ini dapat menjadi wajib pajak yang baik dan taat dengan hak dan kewajiban perpajakan nya nanti.

1.2 Permasalahan Mitra

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu sekolah swasta terbaik tentunya ingin memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik untuk semua siswa-siswi nya, sedangkan dalam perkembangannya ilmu-ilmu yang diberikan pasti mengalami perubahan ataupun perkembangan sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi. Oleh karena itu dirasa penting untuk guru maupun murid mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan terkait perpajakan. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan teknologi dan aturan-aturan yang berlaku di dunia saat ini.

Perkembangan ilmu perpajakan akan lebih memiliki dampak yang luas bagi masyarakat apabila dapat dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintah. Sementara itu para guru yang menjadi tokoh panutan para siswa-siswi memegang peranan sangat strategis dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa, terutama dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan multidimensional. Peran guru sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan sehingga profesionalisme guru adalah sebagai ujung tombak di dalam implementasi kurikulum dan proses belajar mengajar. Tugas guru adalah untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa dalam

mencapai tujuan, serta membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri.

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ada tuntutan guru untuk menjadi pendidik profesional yang mutlak memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional, yang menurut Pasal 10 ayat (1), keempat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi, dan ada sarana lain selain pendidikan profesi yang dapat diupayakan sendiri oleh para guru.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Kegiatan penyuluhan untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan kelanjutan dari pelatihan-pelatihan terkait perpajakan sebelumnya, yang merupakan topik hangat yang mana aturan baru mengenai pengenaan NIK sebagai NPWP baru saja disahkan pada akhir tahun 2022 lalu. Pelatihan perpajakan sebelumnya lebih mengarah kepada teknis terkait dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Dengan dilakukannya kegiatan PKM ini diharapkan para siswa-siswi dapat mengerti dan memahami dengan benar perubahan aturan NIK sebagai NPWP dan dampak serta pengaruh dari perubahan aturan ini.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Perubahan kebijakan ekonomi yang terjadi tentunya menjadi suatu permasalahan dalam dunia pendidikan karena perlu adanya penyesuaian yang membuat dunia pendidikan dituntut untuk memperbaharui pengetahuan atau ilmu akan perubahan ataupun perkembangan aturan-aturan perpajakan yang terbaru supaya nantinya ilmu yang dibagikan dapat membekali pengetahuan dan wawasan siswa-siswinya untuk menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi ini. Penyuluhan pengenalan NIK sebagai NPWP ini diharapkan menjadi nilai tambah bagi para lulusan SMA dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak pada saatnya nanti. Oleh karena itu PKM ini dilaksanakan untuk mempersiapkan dunia pendidikan dalam mengenal lebih dalam mengenai aturan-aturan perpajakan dan diharapkan dapat membekali guru maupun siswa-siswi di SMA Bhinneka Tunggal Ika.

Penyuluhan ini akan memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai Pendaftaran NPWP dengan aktivasi NIK sebagai NPWP, Penghapusan NPWP dengan penonaktifan NIK sebagai NPWP, Integrasi basis data dan proses bagaimana mengaktivasi NIK sebagai NPWP.

PKM ini memberikan Modul Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP untuk dibaca kembali oleh siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika apabila mereka membutuhkan kembali pengetahuan terkait hal ini. Modul tersebut memuat materi bahasan tentang hal-hal yang kami sebutkan di atas. Pemaparan maupun penyuluhan yang dilakukan ini tidak cukup hanya dengan dilaksanakan pada semester Genap 2022/2023 saja, sehingga untuk mengatasi permasalahan SMA Bhinneka Tunggal Ika ini perlu pemaparan materi secara berkesinambungan mengingat siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika akan terus membutuhkan perkembangan pengetahuan hingga mereka lulus SMA agar dapat hidup mandiri. Pemaparan untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika selain diperlukan secara kesinambungan juga diperlukan variasi pelatihan baik pemaparan yang terkait dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan dan hal-hal lain untuk pembekalan siswa/siswi agar dapat mandiri. Dengan demikian, diperlukan kerjasama antar prodi atau fakultas yang ada di Universitas Tarumanagara dan kerjasama dengan lingkungan setempat dalam hal pemberdayaan warga sekitar agar saling bekerjasama menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa-siswi. Kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi juga amat dibutuhkan demi mementaskan siswa/siswi SMA sebagai manusia yang dapat mandiri.

2.2 Luaran Kegiatan

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	
2	Prosiding dalam temu ilmiah	✓
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Publikasi di media massa	✓
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	
4	Model/purwarupa/karya desain	
5	Buku ber ISBN	

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban sebagai penyelesaian proses kegiatan PKM ini dilakukan pada bulan Februari - Juli 2023. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan mengisi jam mata pelajaran ekonomi. Pemaparan dilakukan dengan memberikan Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP secara presentasi disertai sesi tanya jawab.

Kami mendatangi lokasi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika di Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora, pada saat pelaksanaan PKM ini dan mempresentasikan nya secara langsung di hadapan para siswa-siswi SMA. Kami juga memberikan Souvenir dan hadiah yang akan diserahkan pada saat pelaksanaan kegiatan PKM ini.

Pada saat pemaparan, selain memberikan pemaparan mengenai materi Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP, kami selingi dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk para siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan sekedar variasi dalam presentasi yang kami lakukan agar tidak membosankan para siswa-siswi dalam mendengarkan pemaparan kami. Di akhir pemaparan kami menyebarkan angket untuk evaluasi jalannya PKM ini. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan dapat diketahui minat siswa-siswi sekolah Bhinneka Tunggal Ika dan dapat direncanakan untuk topik pelatihan semester berikutnya.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Penyuluhan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan SMA Bhinneka Tunggal Ika. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini adalah dengan mengkoordinir waktu untuk menyelenggarakan pelatihan dan mempersiapkan siswa-siswinya agar dapat mengikuti penyuluhan ini tanpa disibukkan dengan tugas-tugas lainnya.

Pelaksanaan PKM ini diselenggarakan pada jam belajar mata pelajaran ekonomi agar dapat diikuti oleh siswa-siswi dan guru pengampu mata pelajaran ekonomi. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini juga disesuaikan dengan pihak sekolah agar tidak berbenturan dengan kegiatan kami selaku pihak yang memberikan pelatihan dan dilakukan di tanggal 03 Maret 2023.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang berdiri sejak tahun 1959 memiliki Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen serta Program Studi Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntansi, sehingga sudah selayaknya menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat agar ada transfer pengetahuan yang lebih luas. Di sisi lain, dalam Fakultas Ekonomi & Bisnis UNTAR sudah banyak dosen yang telah tersertifikasi dan diwajibkan membuat kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini.

Dalam kegiatan PKM ini pelaksana (Tim PKM) terdiri dari tiga orang dengan satu orang dosen dan didampingi oleh dua orang mahasiswa.

Adapun perincian tim PKM ini adalah:

1. Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP

Kepakaran : Akuntansi dan Pajak

Tugas : Menjadi pembicara sesuai dengan bidang kepakarannya dan mengkoordinasi pelaksanaan PKM.

2. Gilbertus Brian

NIM : 125220191

Tugas : Memberikan angket dan mengumpulkan angket serta membantu pelaksanaan kegiatan PKM dengan mendampingi para siswa-siswi untuk bertanya jika ada materi yang tidak jelas.

3. Lydia

NIM : 125220186

Tugas : Memberikan angket dan mengumpulkan angket serta membantu pelaksanaan kegiatan PKM dengan mendampingi para siswa-siswi untuk bertanya jika ada materi yang tidak jelas.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Kronologi Kegiatan PKM

Pelaksanaan PKM sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi disarankan oleh LPPM untuk dilakukan ke pihak SMA sehingga kami mencari teman yang mengenal kepala sekolah SMA. Dari teman kami yang mengenal kepala sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika, kami menghubungi untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan PKM ini. Pada akhirnya PKM ini dapat terlaksana sesuai kebutuhan kami sebagai dosen dan sesuai juga kebutuhan siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta.

PKM semester Genap 2022/2023 diharapkan dapat memberi pemahaman yang benar terkait perkembangan pengetahuan dan peraturan terkait dengan Penyuluhan perubahan NIK menjadi NPWP dan dapat membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika agar nantinya dapat berguna di masa yang akan datang. Di samping itu, ada beberapa guru yang ikut bergabung di PKM ini yang diharapkan dapat memahami perkembangan perundang-undangan berkaitan dengan NPWP dan sebagai bahan refreshing dalam memahami tentang perubahan kebijakan ini.

Kegiatan PKM ini dilakukan pada Hari Jumat, 3 Maret 2023 Pk.11.00 – 11.30. Susunan acaranya adalah sebagai berikut :

Pk.11.00 – 11.05	Persiapan dan Perkenalan,
Pk.11.05 - 11.20	Kata Sambutan, Foto Bersama, dan dilanjutkan pemaparan materi oleh Pembicara: Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA, BKP
Pk.11.20-11.25	Siswa diminta mengisi angket yang memuat pertanyaan setelah pembekalan PKM.
Pk.11.25-11.30	Penutup

Pada saat pelaksanaan pemaparan materi, kegiatan diikuti oleh sekitar 68 orang siswa-siswi dan 3 orang guru sebagai wali kelas dari siswa-siswi kelas 12 tersebut. Pelatihan dilakukan dengan memberikan pemaparan materi terkait Pajak dan tanya jawab di tengah kegiatan pemaparan materi.

Setelah selesai pemaparan, dilakukan penyebaran angket mengenai tanggapan peserta atas pemaparan ini dengan pengisian angket yang meminta siswa menjawab pertanyaan kondisi sebelum dan setelah PKM ini. Dari sejumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini, ada 68 orang yang bersedia mengisi angket untuk menjawab pertanyaan sebelum dan setelah pemaparan.

Setelah pengisian angket diberikan souvenir dan hadiah.

4.2 Hasil Kegiatan PKM

Siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika telah berusaha menyimak pembahasan teori dengan baik, Hasil jawaban angket siswa- siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika atas pelaksanaan PKM ini dapat dilihat pada table IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1

Hasil Respon Angket Setelah Pemaparan

Responden	Sesudah				
	1	2	3	4	5
1	3	4	3	2	1
2	4	2	3	2	4
3	3	4	3	2	1
4	4	3	3	2	3
5	3	4	3	2	2
6	3	3	4	2	1
7	3	4	3	2	2
8	4	3	3	2	1

9	3	4	3	2	3
10	2	4	3	3	2
11	3	1	4	1	1

12	4	4	3	3	1
13	3	3	4	2	2
14	4	4	3	2	1
15	4	4	3	2	4
16	3	4	3	3	1
17	4	4	3	2	2
18	4	4	3	3	1
19	3	4	1	2	2
20	3	4	3	2	1
21	4	4	3	3	2
22	4	3	3	2	3
23	3	4	3	2	1
24	2	4	1	2	4
25	3	4	4	2	1

26	4	4	3	2	1
27	1	4	3	2	2
28	2	4	3	2	2
29	3	4	3	2	2
30	3	4	2	2	1
31	2	4	4	2	3
32	3	4	3	2	1
33	4	4	3	2	4
34	4	4	4	2	1
35	3	4	2	2	3
36	3	4	1	2	1
37	4	4	3	2	3
38	3	4	4	4	1
39	1	4	3	2	2
40	4	2	1	2	3
41	3	4	3	2	3
42	3	4	3	4	1
43	2	4	4	2	3

44	3	4	2	2	1
45	3	4	3	3	4
46	3	4	4	2	1
47	3	2	3	2	1
48	3	2	4	2	2
49	3	3	3	2	1
50	1	4	3	2	3

51	3	4	3	1	1
52	2	4	3	2	2
53	3	4	4	2	2
54	3	2	3	2	1
55	1	4	3	2	3
56	3	4	3	2	1
57	3	4	4	2	1
58	1	1	3	2	4
59	3	2	4	2	1
60	3	4	3	2	2

61	4	4	2	1	1
62	4	4	3	1	2
63	4	4	3	4	3
64	2	4	2	2	3
65	3	4	3	1	4
66	3	3	3	5	1
67	3	3	4	1	2
68	4	2	1	3	4

Tabel IV.1 di atas menggambarkan kolom berupa 5 pertanyaan yang sama untuk sesudah pelatihan dan baris yang menunjukkan jumlah 68 siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika yang menjawab angket. Dari hasil angket di atas dapat dilihat bahwa ada perubahan yang positif dalam jawaban pertanyaan (jawaban yang akurat adalah 3,1,4,4,2) dari para siswa-siswi tersebut.

4.3 Luaran yang Dicapai

Luaran kegiatan PKM ini berupa Artikel Pengenalan Perubahan NIK Menjadi NPWP. Kami berharap dengan pemaparan ini dapat membekali siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika untuk lebih memahami apa saja perubahan yang terjadi yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Hal ini diharapkan dapat menjadi bekal siswa-siswi di masa depan. Di samping artikel, PKM ini diikutsertakan dalam acara SERINA 2023 dan akan disajikan dalam artikel PINTAR. Foto kegiatan PKM selengkapnya dapat dilihat di lampiran 2, salah satunya disajikan di bawah ini:



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemaparan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan SMA Bhinneka Tunggal Ika. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini adalah dengan mengkoordinir waktu untuk menyelenggarakan pemaparan dan mempersiapkan siswa-siswinya agar dapat mengikuti pemaparan ini tanpa kegiatan lainnya seperti mengerjakan tugas sekolah. Pelaksanaan PKM ini diselenggarakan pada jam mata pelajaran Ekonomi agar dapat diikuti oleh siswa-siswi dan guru pengampunya. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini juga disesuaikan dengan pihak sekolah agar tidak berbenturan dengan kegiatan kami selaku pihak yang memberikan pemaparan yang disepakati dilakukan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Dari jawaban yang diberikan, kami dapat menyimpulkan bahwa materi perubahan NIK menjadi NPWP dapat mereka pahami dan kami berharap semoga materi ini berguna bagi mereka dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata bukan lagi hanya sekedar teori. Dari adanya antusias siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika yang sangat besar dalam mengikuti PKM ini maka dapat disimpulkan PKM ini telah berlangsung dengan baik. Siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika telah mendengarkan dan memahami pembahasan mengenai semua hal terkait dengan pengetahuan perubahan NIK menjadi NPWP, dan sudah berupaya untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam PKM ini dengan baik. Pada akhir dari pemaparan ini juga telah dibagikan angket untuk mengetahui tanggapan siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika atas PKM ini.

5.1 Saran

PKM semester berikutnya dapat menindak lanjuti PKM sebelumnya sehingga ada kesinambungan dengan pembekalan topik yang dibutuhkan seperti yang telah terungkap dari pemahaman siswa/i dalam angket PKM sebelumnya. Terkait pembekalan siswa di masa depan sebaiknya terus diberikan pelatihan karena pada tahun depan akan ada siswa-siswi yang baru masuk, di samping itu topik lain yang kompetensinya dimiliki oleh dosen-dosen Untar dapat dijadikan masukan untuk PKM semester berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://djponline.pajak.go.id>
2. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nik-jadi-npwp-dan-cara-validasinya-lt6406d86166acd/>
3. Even Gio Lumban Tobing, Kusmono kusmono (2022), Jurnal Pajak Indonesia Vol. 6 No. 2 : Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
4. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15420/NIK-sebagai-NPWP-dan-potensi-sinergi-DJP-DJKN.html>
5. www.btika.sch.id
6. <https://disdukcapil.okukab.go.id/v2/berita/detail/nik-jadi-npwp-semua-orang-wajib-bayar-pajak>
7. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
8. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
9. Dieni Indrajati W, Estralita T., 2021, Pelayanan Dan Asistensi Pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di Sekitar Kampus Untar, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021, 21 Oktober 2021, Jakarta.
10. Mustaqiem (2017), Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia, Buku Litera Yogyakarta
11. Nataherwin dan Elyn Mareni (2021), Pengetahuan Pajak Kepada Siswa-Siswi SMA Kristen Almasih, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021, 21 Oktober 2021, Jakarta.
12. Resmi, Siti (2020), Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta
13. Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo, Syanti Dewi, 2018, Belajar Mudah Perpajakan, Mitra Wacana Media, Jakarta
14. Yuniarwati dan Purwo Adi Nugroho (2022), Sosialisasi Pemanfaatan Uang Pajak Bagi Anak SMA Di Jakarta Barat, Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022, 20 April 2022, Jakarta.

Lampiran 1

PPT PENYULUHAN PERUBAHAN NIK MENJADI NPWP KEPADA SISWA-SISWI SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA PKM SEMESTER GENAP 2023/2024

Topik Pemaparan PKM

- 1) Latar dan Tujuan Perubahan Kebijakan
- 2) Proses Transisi Perubahan NIK Menjadi NPWP
- 3) Manfaat Dan Dampak Perubahan tersebut terhadap masyarakat

UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi BAN PT A QS STARS RATING SYSTEM ICAEW CHARTERED ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP untuk Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika

Oleh : Tony Sudirgo SE., MM., Ak., CA,
BKP
Dibantu : Gilbertus Brian
Lydia

www.untar.ac.id [Untar Jakarta](#) [@UntarJakarta](#) [@untarjakarta](#)

Latar Belakang

Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

PMK -112/PMK.03/2022

Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah

1



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Implementasi NIK Sebagai NPWP



5



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lampiran 2
FOTO-FOTO KEGIATAN PKM



Lampiran 3 **ARTIKEL SERINA**

PENGENALAN PERUBAHAN NPWP MENJADI NIK *BAGI SISWA-SISWI SMA*

Tony Sudirgo¹, Gilbertus Brian², Lydia Suryani Tjahjadi³.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

[1tonys@fe.untar.ac.id](mailto:tonys@fe.untar.ac.id)

[2gilbertus.125220191@stu.untar.ac.id](mailto:gilbertus.125220191@stu.untar.ac.id)

[3lydia.125220186@stu.untar.ac.id](mailto:lydia.125220186@stu.untar.ac.id)

ABSTRACT

Indonesia is about to enter an era where one KTP can be used for various administrative matters; this is marked by the application of NIK to NPWP (Single Identity Number system), which is believed to simplify the tax administration system and build a robust database for the government. Young school children are still confused by the change in this rule, so an introduction is made in the form of counseling, which aims to provide an overview of fulfilling the principle of convenience-benefit with the application of NIK to become NPWP for Individual Taxpayers as stipulated in Law Number 7 the Year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. To understand the changes, this presentation was made for Bhineka Tunggal Ika High School students as PKM partners who will provide provisions for Bhineka Tunggal Ika High School students to enter the world of work later. The method of implementing this presentation is done by explaining and discussing in addition to a question and answer procession, which is all done face to face. In its implementation, it can be concluded that many students still need to learn the impacts and consequences of changing NIK to NPWP, so it is very appropriate to carry out counseling like this.

Keywords: PKM, Identity Card, NIK, NPWP, Bhineka Tunggal Ika High School.

ABSTRAK

Indonesia akan memasuki era dimana satu KTP dapat dipergunakan untuk berbagai urusan administrasi, hal ini ditandai dengan penerapan NIK menjadi NPWP (sistem Nomor Identitas Tunggal) yang diyakini dapat mempermudah sistem administrasi perpajakan dan membangun basis data yang kuat bagi pemerintah. Anak-anak sekolah yang berusia belia masih bingung dengan adanya perubahan aturan ini sehingga dilakukanlah pengenalan dalam bentuk penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan gambaran pemenuhan asas kemudahan-kemanfaatan dengan adanya penerapan NIK menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk memahami perubahan yang terjadi presentasi ini dibuat untuk siswa SMA Bhineka Tunggal Ika sebagai mitra PKM yang akan menjadi bekal bagi siswa SMA Bhineka Tunggal Ika dalam memasuki dunia kerja nantinya. Metode pelaksanaan presentasi ini dilakukan dengan menjelaskan dan berdiskusi selain adanya prosesi tanya jawab yang semuanya dilakukan secara tatap muka. Dalam implementasinya dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa-siswi yang belum mengetahui apa saja dampak dan akibat dari perubahan NIK menjadi NPWP, sehingga sangat tepat dengan dilaksanakannya penyuluhan seperti ini.

Kata kunci: PKM, KTP, NIK, NPWP, SMA Bhineka Tunggal Ika.

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Sekolah Bhineka Tunggal Ika pada awal pendirian nya bernama Ta Tung. Didasarkan atas rasa keprihatinan Alm. Bpk Djoko Haryono terhadap dunia pendidikan maka pada tahun 1968 sekolah ini didirikan. Wakil Presiden Republik Indonesia (Alm Mohammad Hatta) di tahun 1971 berinisiatif untuk mengubah nama Ta Tung menjadi Sekolah Bhineka Tunggal Ika. Yayasan Pendidikan Bhineka Tunggal Ika yang menaungi sekolah yang berazaskan Pancasila tanpa memandang suku, ras, dan agama (SARA) ini terus berpartisipasi dalam pengembangan pembelajaran, serta pelayanan sosial lainnya dan mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dalam berbagai bidang. Dalam hal ini Yayasan menyediakan Pembelajaran Umum (SMA) maupun Kejuruan (SMK) sebagai bagian dari upaya memenuhi tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk pribadi yang tangguh serta menghargai adanya toleransi. Berikut adalah foto Sekolah Bhineka Tunggal Ika yang menjadi mitra pelaksanaan PKM ini :

Gambar 1



Sekolah Bhineka Tunggal Ika memiliki Visi dan Misi yang diungkapkan sebagai berikut:

Visi : Menjadi Lembaga Pendidikan Nasional terkemuka dan modern yang turut serta membangun generasi Penerus Bangsa dalam Ilmu, Iman dan Karakter tanpa memandang Suku, Ras dan Agama berasaskan Pancasila.

Misi : Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Pendidikan Karakter, Pengajaran Bermutu, Toleran dan Menghargai Semua Perbedaan yang ada, melalui peserta didik yang dipercayakan Orang Tua dan Wali Murid kepada Kami sebagai Lembaga Pendidik Terpercaya.

Dalam melaksanakan hal di atas, sekolah Bhineka tunggal Ika melaksanakan pendidikan pengembangan karakter, memberikan pengajaran berkualitas, meningkatkan rasa toleransi, dan memberikan pendidikan multikultural yang menghargai perbedaan dan menerima keberagaman.

Para siswa-siswi sekolah adalah bagian dari populasi yang beranjak dewasa yang akan memperoleh penghasilan pada waktunya nanti sehingga akan memiliki potensi untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagai pegawai atau wirausaha serta akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identitas pembayar pajak yang pada umumnya mereka masih tidak paham atau “buta” mengenai aturan-aturan yang terkait dengan perpajakan. Tidak lah mudah bagi seseorang untuk dapat memahami aturan-aturan terkait dengan perpajakan, apalagi bagi para siswa-siswi sekolah yang notabene masih beruisa sangat belia. Sehubungan dengan kaitannya sebagai Wajib Pajak, para siswa-siswi ini perlu mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka kelak. Sebagai Wajib Pajak, para siswa-siswi sekolah menengah atas ini perlu juga mengetahui ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai bekal mereka setelah lulus dan menjadi bagian masyarakat seutuhnya. Selain itu dengan memberikan kesadaran dari awal akan pentingnya pajak bagi negara maka setiap warganegara Indonesia diharapkan menjadi lebih patuh dan sadar dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimanapun, perpajakan yang ada saat ini terkait dengan sejarah. Berbagai hal yang berkaitan dengan pajak yang kita kenal sekarang seperti Pajak Penghasilan, Bea Cukai, Tax Treaty, Pajak Penjualan, Bea Materai, Restitusi, dan bahkan Tax Audit merupakan warisan masa lalu yang masih berlaku sampai saat ini. Dengan perjalanan panjang yang penuh lika-liku, saat ini pajak dapat menjadi alat yang efektif dan efisien untuk membiayai pengeluaran bersama untuk kepentingan bersama pula. Karena itu biarkanlah luka dan peperangan

tetap menjadi masa lalu. Di masa sekarang: “Orang Bijak Taat Pajak dan Aparat Pajak Harus Bijak “ (Mustaqiem,2014, hal 60).

Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 ayat (1a) adalah pengenaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Pasal 2 ayat (2) dan dijelaskan lebih lengkap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 . Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah :

1. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi;
2. Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP;
3. Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Menurut Djeni dan Estralita (2021) bahwa setiap orang pribadi yang berpenghasilan merupakan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak harus mengerti akan kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dimilikinya.

Sementara menurut Yuniarwati dan Nugroho (2022) bahwa tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak nya diperlukan NPWP sebagai identitas dari si pembayar pajak. Saat ini dan mendatang maka identitas NPWP ini akan segera digantikan oleh NIK yang ada di KTP untuk memudahkan negara dan si wajib pajak dalam mencantumkan nomor identitas dalam pembayaran pajak nya.

Menurut Nataherwin dan Mareni (2021), banyak orang yang kalau mendengar kata-kata membayar pajak bisa membuat pusing atau sengaja menghindarinya. Hal tersebut terjadi karena pajak bagi sebagian orang berkesan rumit dan juga membingungkan, serta sering merasa keberatan untuk mengurangi pendapatan mereka demi membayar pajak. Orang sering kali tidak berpikir bahwa selama ini kenikmatan menggunakan jalan raya, jembatan, penerangan jalan, taman dan fasilitas lainnya bukan berasal dari pajak yang dibayarkan mereka.

Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak menjadi perhatian kami sebagai pendidik agar para siswa-siswi sekolah ini dapat menjadi warganegara yang baik dan taat dengan hak dan kewajiban perpajakannya nanti.

1.2 Permasalahan Mitra

Sekolah Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu sekolah swasta terbaik akan terus berusaha memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik, sementara dalam perkembangannya ilmu-ilmu yang diberikan pasti mengalami dinamika mengikuti perubahan zaman yang terjadi. Oleh karena itu pihak sekolah merasa penting untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan terkait perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia perpajakan. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan teknologi dan aturan-aturan yang berlaku di dunia saat ini.

Perkembangan ilmu perpajakan yang mana mengalami perubahan peraturan dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia memiliki dampak yang luas bagi masyarakat dikaitkan dengan penerimaan negara yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat atau tidak. Para guru yang menjadi tokoh panutan dapat berperan sebagai bagian yang dapat meningkatkan kesadaran para siswa dalam melakukan pembayaran pajak sehingga para guru ini tentu harus memiliki pula pengetahuan yang dapat dibagikan kembali kepada para siswa. Sementara itu, para siswa juga harus diberikan pengetahuan mendasar mengenai perpajakan agar paling tidak dapat mengetahui kewajiban minimal yang harus mereka penuhi dan hak yang dapat mereka peroleh setelah melakukan pembayaran pajak. Untuk itu para guru dan siswa harus saling berkolaborasi dalam mendalami pemahaman mengenai perpajakan ini.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Kegiatan penyuluhan untuk siswa-siswi SMA Bhineka Tunggal Ika ini merupakan kelanjutan dari pelatihan-pelatihan terkait perpajakan sebelumnya, yang merupakan topik hangat yang mana aturan baru mengenai pengenaan NIK sebagai NPWP baru saja disahkan pada akhir tahun 2022 lalu. Pelatihan perpajakan sebelumnya lebih mengarah kepada teknis terkait dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Dengan dilakukannya kegiatan PKM ini maka para siswa-siswi dapat mengerti dan memahami dengan benar perubahan aturan NIK sebagai NPWP dan dampak serta pengaruh dari perubahan aturan ini.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

2.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Tahapan-tahapan pelaksanaan PKM ini dilakukan dari bulan Februari sampai dengan Juli 2023. Kegiatan persiapan dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada pihak Kepala Sekolah untuk menyampaikan maksud dan keinginan kami dalam melaksanakan penyuluhan ini berikut dengan topik yang ingin kami sampaikan. Kegiatan pelaksanaan dilakukan dengan memberikan penyuluhan pada jam mata pelajaran ekonomi dengan topik “Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP” secara presentasi disertai sesi diskusi.

Kami melakukan penyuluhan ini dengan mendatangi lokasi Sekolah Bhineka Tunggal Ika yang ada di Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora. Kami melakukan penyuluhan secara langsung di hadapan para siswa-siswi sekolah disertai pemberian souvenir dan hadiah pada pelaksanaannya.

Saat dilakukan pemaparan, kami menjelaskan berbagai materi Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP dan juga dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk para siswa-siswi sekolah tersebut, yang dilakukan untuk memberikan pembedaan dalam presentasi yang kami lakukan agar tidak membosankan para siswa-siswi dalam mendengarkan pemaparan kami ini. Sebagai bagian akhir dari pemaparan disebarkan angket untuk mengevaluasi jalannya PKM ini. Sebagai kesimpulan kita dapat mengetahui minat siswa-siswi sekolah terkait topik pemaparan ini dan agar dapat direncanakan topik berikutnya untuk pelatihan atau penyuluhan di semester berikutnya.

2.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Penyuluhan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak sekolah akan perkembangan ilmu

perpajakan. Partisipasi mitra dalam hal ini adalah mempersiapkan waktu penyelenggaraan penyuluhan ini dan siswa-siswinya agar dapat mengikuti pemaparan ini tanpa adanya kesibukan lain. Pelaksanaan PKM ini diselenggarakan pada saat waktu mata pelajaran ekonomi yang diikuti oleh para siswa-siswi dan guru pengampu mata pelajaran ekonomi yang berkepentingan dengan pengetahuan perpajakan yang *up-to-date*. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana pelatihan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak sekolah untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan yang terbaru, maka penyuluhan ini dilakukan pada saat waktu mata pelajaran ekonomi yang merupakan mata pelajaran yang terkait erat dengan perpajakan yang diikuti oleh siswa-siswi dan guru pengampu mata pelajaran ekonomi. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini juga akan disesuaikan dengan pihak sekolah agar tidak berbenturan dengan kegiatan kami selaku pihak yang memberikan pemaparan yaitu hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB.

Pada pelaksanaan pemaparan kami menjelaskan mengenai adanya perubahan peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang akan berlaku mulai 01 Januari 2024 tentang adanya perubahan pencamtuman NIK sebagai pengganti NPWP. Kami menjelaskan secara singkat beberapa pengertian atau istilah perpajakan terkait dengan ketentuan ini dan secara teknis kami juga menjelaskan bagaimana cara mengubah NIK menjadi NPWP termasuk dampak dan akibat dari perubahan tersebut terhadap sektor perpajakan. Sesuai dengan PMK 112/PMK.03/2022 disebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi WNI, sedangkan untuk WNA, Badan, dan Intansi Pemerintah cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP aktif mereka saat ini, sehingga akhirnya semua NPWP nantinya akan mempunyai 16 digit.

Dalam proses pemberian materi ada beberapa dari siswa yang bertanya mengenai prosedur pelaksanaannya secara nyata di lapangan, yang dapat kami jelaskan secara singkat mengenai tata cara pergantian NIK menjadi NPWP tersebut. Selain menjelaskan tentang tata cara perubahan kami juga mengingatkan bahwa dunia sudah berkembang termasuk juga beberapa peraturan pemerintahan seperti perubahan NIK menjadi NPWP yang memiliki dampak cukup besar

nantinya. Untuk itu, sebagai seorang siswa-siswi yang akan memasuki dunia pekerja atau menjadi pengusaha kelak, maka materi ini dapat menjadi pedoman atau pegangan dasar bagi mereka dalam memahami apa saja dampak yang dihasilkan dan bagaimana prosedur perubahan tersebut. Dari hasil diskusi tersebut, kami berpendapat bahwa materi Perubahan NIK menjadi NPWP ini telah dapat mereka pahami dan kami berharap semoga materi ini berguna bagi mereka dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata bukan lagi hanya sekedar teori. Terlihat juga antusiasme para siswa/siswi dalam mengikuti kegiatan ini yang mana mereka telah mendengarkan dan memahami pembahasan tentang semua hal terkait dengan aktivasi NIK menjadi NPWP beserta dampak-dampaknya, dan sebagian dari peserta telah menjawab beberapa pertanyaan yang kami berikan. Pada akhir dari penyuluhan kami memberikan beberapa komentar, saran dan pendapat dan juga meminta pendapat, saran, dan komentar dari para siswa-siswi peserta mengenai materi yang kami berikan dan pelaksanaan PKM ini.

Sebagian dari foto-foto kegiatan PKM dtampilkan dibawah ini :

Gambar 2. Foto Materi PKM

Tujuan Kebijakan

1. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi.
2. Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
3. Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Gambar 3. Foto Materi PKM

manfaat dan dampak



1. Memudahkan masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajak
2. Memudahkan dalam pengurusan npwp, jadi hanya perlu menggunakan nik saja
3. Tidak perlu memiliki 2 kartu (NPWP dan KTP)
4. meningkatkan penerimaan pajak bagi negara
5. mempermudah proses pencatatan dan administrasi pajak bagi pemerintah

10



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Gambar 4. Foto saat kegiatan penyuluhan



4. KESIMPULAN DAN SARAN

PKM dengan topik Pengenalan Perubahan NIK menjadi NPWP untuk siswa-siswi SMA Bhineka Tunggal Ika sudah dilaksanakan dengan baik. Penjelasan yang kami berikan tentang materi perpajakan juga dapat diterima dengan baik oleh para siswa-siswi dengan mampunya para siswa-siswi tersebut menjawab beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Saran yang dapat kami berikan adalah agar para siswa-siswi sekolah ini lebih sering diberikan materi perpajakan agar sedari muda telah mengerti dan sadar akan pentingnya penerimaan negara dari pajak bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang tangguh dan mampu membiayai masyarakatnya sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai ucapan terima kasih, yang pertama saya berikan kepada Bapak Edi Fredi, S.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini. Saya tidak lupa pula memberikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Manajer Bidang PKM, Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T. yang telah banyak membantu dan menyetujui proposal termasuk pendanaan agar dapat terselenggaranya kegiatan ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Gilbertus Brian dan Saudari Lydia Suryani Tjahjadi, mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Tarumanagara yang telah membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini.

REFERENSI

Buku

Mustaqiem (2017), Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia, Buku Litera Yogyakarta

Resmi, Siti (2020), Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta

Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo, Syanti Dewi, 2018, Belajar Mudah Perpajakan, Mitra Wacana Media, Jakarta

Jurnal

Dieni Indrajati W, Estralita T., 2021, Pelayanan Dan Asistensi Pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di Sekitar Kampus Untar, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021, 21 Oktober 2021, Jakarta.

Even Gio Lumban Tobing, Kusmono kusmono (2022), Jurnal Pajak Indonesia Vol. 6 No. 2 : Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat

Nataherwin dan Elyn Mareni (2021), Pengetahuan Pajak Kepada Siswa-Siswi SMA Kristen Almasih, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021, 21 Oktober 2021, Jakarta.

Yuniarwati dan Purwo Adi Nugroho (2022), Sosialisasi Pemanfaatan Uang Pajak Bagi Anak SMA Di Jakarta Barat, Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022, 20 April 2022, Jakarta.

Peraturan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Website

<https://djponline.pajak.go.id>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/nik-jadi-npwp-dan-cara-validasinya-1t6406d86166acd/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15420/NIK-sebagai-NPWP-dan-potensi-sinergi-DJP-DJKN.html>

www.btika.sch.id

<https://disdukcapil.okukab.go.id/v2/berita/detail/nik-jadi-npwp-semua-orang-wajib-bayar-pajak>

ARTIKEL PINTAR

**PENYULUHAN PENGGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP UNTUK
SISWA-SISWI SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA JAKARTA**



**Tony Sudirgo SE., MM., Ak.,
CA, BKP**

Dosen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Tarumanagara



Gilbertus Brian

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Tarumanagara



Lydia Suryani Tjahjadi

Mahasiswi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas
Tarumanagara

Menurut kebijakan baru dari pemerintah menetapkan bahwa terjadi perubahan dari penggunaan NIK menjadi NPWP, maka dari itu kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara memberikan pengenalan materi tentang perubahan tersebut berupa pengenalan atas proses perubahannya dan dampak perubahan tersebut. Perubahan kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2024. Pengenalan materi perubahan ini dijelaskan kepada para siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika yang berlokasi di Jalan KH Moh Mansyur atau lebih dikenal dengan sebutan wilayah “Jembatan Lima”. Lokasi sekolah tersebut berada di lingkungan yang aktif. Sekolah ini juga berbaur dengan usaha-usaha yang ada di sekitarnya. Sekolah Bhinneka Tunggal Ika atau sebelumnya bernama “Ta Tung” adalah sekolah asimilasi pertama di Indonesia yang perubahan namanya dilakukan oleh wakil presiden Republik

Indonesia pertama yaitu oleh (Alm) Mohammad Hatta atau juga dikenal dengan nama Bung Hatta.

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah sekolah yang berasaskan Pancasila. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Sekolah ini ingin memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan kepada semua pelajarnya agar menjadi sebuah bekal mereka dikemudian hari. Maka dari itu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara (FEB UNTAR) diundang ke Sekolah Bhinneka Tunggal Ika untuk melaksanakan pemaparan materi tersebut ini dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai bagian dari Tri Darma perguruan tinggi.

Penyuluhan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diterbitkan untuk memperbaharui aturan perpajakan yang mana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi WNI dan untuk WNA, Badan, dan Instansi Pemerintah cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP aktif mereka saat ini, sehingga akhirnya semua NPWP nanti akan mempunyai 16 digit. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2022. Apa saja yang berubah dalam peraturan ini?

Pelaksanaan amanat UU HPP mengatur bahwa format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk Indonesia sekarang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini dimaksudnya agar tercapai tiga tujuan kebijakan yaitu :

1. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi.
2. Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
3. Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan

Pengenalan ini dilaksanakan dengan memberikan penjelasan materi melalui presentasi dan didampingi dengan sesi tanya jawab. Pada saat selesai kami memberikan angket, dan diakhiri dengan penyerahan souvenir dan hadiah untuk siswa-siswi yang telah mengikuti penyuluhan tersebut.

Pengenalan perubahan NIK menjadi NPWP ini dilakukan secara luring dengan datang ke sekolah hal ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2022 sedangkan pemaparannya dilakukan oleh penulis (Tony) dan dibantu oleh 2 orang mahasiswa Untar (Gilbertus dan Lydia) yang berisikan materi tentang apa saja yang berubah dan apa dampak dari perubahan kebijakan tersebut.

Pengenalan materi ini berhasil dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, sehingga kami berharap dengan adanya pemaparan ini para siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika mampu menjadi wajib pajak yang patuh dan taat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya kelak pada saat mereka sudah bekerja atau memiliki usaha pribadi.

Di kesempatan ini pula tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada LPPM dan FEB UNTAR yang sudah mendanai dan mendukung terlaksananya PKM ini dengan baik dan lancar.

Nantikan PKM Perpajakan kami selanjutnya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

No: 0098-Int-KLPPM/UNTAR/III/2023

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Tony Sudirgo, SE., MM., Ak., CA, BKP

sebagai

KETUA TIM

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara
Skema Reguler, dengan judul:

**Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP Untuk
Siswa-Siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika.**

yang telah dilaksanakan pada
Januari – Juni 2023

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE